

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Silpa Kota Depok Mencapai Rp 500 Miliar

Entitas / Cakupan : Kota Depok

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.12

Edisi : Rabu, 4 Juli 2018

## Silpa Kota Depok Mencapai Rp 500 Miliar

### DEPOK, (PR).-

Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Kota Depok pada 2017 mencapai Rp 500 miliar. Pemerintah Kota Depok ber alasan, anggaran tak semuanya terserap karena persoalan nonteknis dan gagal lelang.

"Misalnya syarat-syarat administrasi hibah atau fasos (fasilitas sosial) dan sebagainya yang tidak memenuhi syarat kemudian juga persoalan nonteknis lain," kata Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna selepas menghadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Depok di Gedung DPRD Depok, Selasa (3/7/2018).

Pradi mengungkapkan, selain persoalan nonteknis, sejumlah proyek lelang. Persoalan tersebut muncul karena adanya persoalan hukum.

Dia mencontohkan gagalnya pembangunan sebuah gedung SMP karena tersendatnya proses pembebasan lahan. Alih-alih menyelenggarakan lelang untuk pembangunan sekolah, Pemkot sudah kesulitan terlebih dahulu untuk mendapatkan lahan. "Ternyata lahannya imasih ada dalam ranah hukum (sengketa) kan seperti (itu), tidak mungkin

kita intervensi," ucapnya.

Nilai jual lahan yang melambung setiap tahun ikut andil mempersulit proses pembebasan. Padahal, lanjut Pradi, ada janji-janji Pemkot Depok yang mesti dipenuhi terkait dengan pengadaan lahan seperti pengadaan ruang terbuka hijau. "Misalnya mau beli lahan, tahun ini kita pastikan nilai sekian tetapi ternyata tahun depan sudah naik," ucapnya.

### Kota Cirebon

Tingginya silpa tahun 2017 yang mencapai Rp 79 miliar menjadi sorotan semua fraksi DPRD Kota Cirebon, saat Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Selasa (3/7/2018).

Tingginya silpa menjadi bahan catatan karena terkait dengan kinerja Pemkot dalam memanfaatkan APBD 2017 yang sebesar Rp 1,469 triliun.

Sumardi dari Fraksi PAN bahkan meminta ada pengecekan bersama-sama atas saldo kas daerah, untuk memastikan nominal saldo di kas sesuai dengan laporan. **(Ani Nunung, Bambang Arifianto)\*\*\***